

ANALISA
a I V

Laporan Kinerja
KPKNL Jakarta IV

2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR - i
RINGKASAN EKSEKUTIF - iv

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
KPKNL Jakarta IV - 1
- B. Peran Strategis
KPKNL Jakarta IV - 4
- C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan
dengan Pencapaian Kinerja - 5
- D. Sistematika Laporan - 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis - 7
- B. Penetapan Kinerja - 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi - 12
- B. Realisasi Anggaran - 26

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum - 28
- B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk
Tahun Mendatang - 28

Lampiran

- Kontrak Kinerja Kepala
KPKNL Jakarta IV Tahun 2024

PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai tindak lanjut nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dan merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPKNL Jakarta IV pada Tahun 2024.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, DJKN telah menerapkan sistem *Balance Score Card (BSC)* sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Jakarta IV dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2024. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV Tahun 2024 sebesar **114,98%**. Hasil tersebut merupakan capaian kinerja KPKNL Jakarta IV sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2024 ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Jakarta IV. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus menuju kesempurnaan. Dengan semangat kerja cerdas dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat kita selesaikan sesuai harapan publik.

Kepada seluruh pegawai KPKNL Jakarta IV yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala KPKNL Jakarta IV,



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jakarta IV mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta IV mempunyai fungsi: (1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang; (4) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara; (5) pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) pelaksanaan pelayanan lelang; (7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; (8) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; (9) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; (10) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; (11) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; (12) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang; (13) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (14) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN untuk tahun 2020-2024 adalah **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV adalah sejalan dan menyesuaikan dengan tujuan DJKN, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap IKU yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta IV. Sesuai dengan Peta Strategis KPKNL Jakarta IV Tahun 2024, telah ditetapkan **11 (sebelas)** sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja KPKNL Jakarta IV Tahun 2024.

Sasaran strategis satu yaitu sasaran strategis **Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan** yang terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu: **(1)** Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna Layanan dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dengan realisasi IKU tahun 2023 adalah sebesar 106,4%. **(2)** Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp80.195.700.000 dengan persentase 100%. IKU ini berasal dari penerimaan PNBPN dari Pengelolaan BMN, PNBPN dari Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dengan realisasi IKU tahun 2023 adalah sebesar 113,98%. **(3)** Indeks Integritas dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 89,17, dengan realisasi IKU tahun 2023 adalah sebesar 100,56%.

Sasaran strategis dua yaitu **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**. Terdapat 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan dengan target untuk tahun 2024 sebesar 71,5%. **(2)** Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dengan target untuk tahun 2024 adalah sebesar 86,5%, pada tahun 2023, realisasinya sebesar 111,02%.

Sasaran strategis tiga yaitu **Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal**. Terdapat 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Persentase realisasi pokok lelang dengan target untuk tahun 2024 sebesar 100%, atau dengan nilai Rp600.200.000.000, sedangkan realisasi dari tahun 2023 sebesar 98,41%. **(2)** Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan target untuk tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan nilai Rp300.000.000.000, pada tahun 2023, tingkat realisasi outstanding piutang negara sebesar 124,26%.

Sasaran strategis keempat yaitu **Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien** terdapat 1 (satu) IKU yaitu Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian. Adapun realisasi IKU tahun 2023 sebesar 96,04. Sedangkan target untuk tahun 2024 sebesar 75.

Sasaran strategis kelima yaitu **Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif** yang terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Persentase bidang tanah BMN yang disertipatkan dengan target IKU pada tahun 2024 adalah 100% atau sebanyak 31 bidang tanah, sedangkan realisasi IKU ini pada tahun 2023 adalah 120%. **(2)** Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan jumlah aset yang dievaluasi kinerja dan disampaikan Rekomendasinya sebanyak 87 dan Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Satker 6. Di tahun 2023, realisasi IKU ini adalah 120,71%.

Sasaran strategis keenam yaitu **Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang yang Produktif**, terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu **(1)** Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan realisasi di tahun 2023 mencapai 104%, sedang target di tahun 2024 sebesar 71% atau dengan total 3132 BKPN. **(2)** Persentase produktivitas lelang dengan target untuk tahun 2024

adalah sebesar 89%, pada tahun 2023 tingkat realisasi persentase produktivitas lelang adalah sebesar 120%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu **Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**, terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu **(1) Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian** dengan target di tahun 2024 sebesar 16%. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 0,0% dari target sebesar 15%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif**. Terdapat 2 (dua) IKU pada sasaran strategis ini yaitu **(1) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai** dengan target tahun 2024 sebesar 90%. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 120% dari target sebesar 100%. **(2) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko** dengan target tahun 2024 sebesar 85. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 99,13 dari target sebesar 80.

Sasaran strategis kesembilan adalah **Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**. Pada Tahun 2024, sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu: **(1) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 99,79 dari target 100 sedangkan target tahun 2024 sebesar 100. **(2) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN** dengan target di tahun 2024 sebesar 10%, IKU ini di tahun 2023 mencapai realisasi 0,0% dari target 15%.

Sasaran strategis kesepuluh adalah **Komunikasi publik yang Efektif**, terdapat 1 (satu) IKU di dalamnya yaitu **Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)** dengan target tahun 2024 sebesar 80.

Sasaran strategis kesebelas adalah **Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah**, terdapat 1 (satu) IKU di dalamnya yaitu: **Indeks Efektivitas UKI** dengan target di tahun 2024 sebesar 82.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

- m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta IV terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Jakarta IV didukung oleh sumber daya manusia dalam berbagai bidang dan keahlian. Jumlah pegawai KPKNL Jakarta IV pada 31 Desember 2024 adalah sebanyak 42 pegawai dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	0
2.	SLTP	-	-	-	-	0
3.	SLTA	-	-	1	-	1
4.	DI/DII	-	-	1	-	1
5.	DIII	-	-	3	-	3
6.	DIV/Sarjana	-	4	21	-	25
7.	Pasca Sarjana/Master	-	-	5	7	12
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	0
TOTAL		0	4	31	7	42

II. Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	5	3	0	8
31-40	0	0	13	0	13
41-50	0	0	12	5	17
diatas 50	0	0	2	2	4
Jumlah	0	5	30	7	42

III. Tenaga Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Juru Sita	3
2.	Pemeriksa	4
3.	Pranata Keuangan APBN	1
4.	Pelelang (Jabfung)	6
5.	Penilai (Jabfung)	5
TOTAL		19

B. Peran Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta IV memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Jakarta IV turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta IV selaku *asset manager* yang efektif dan produktif mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara, setelah itu dilakukan inventarisasi menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang berasal dari BLU dan instansi pemerintah.

d. Pelayanan Lelang

Berlakunya PMK Nomor 122 tahun 2024 tentang perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu

putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penawaran lelang melalui elektronik (*email*) dan internet (*e-auction*) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. *E-auction* dapat dilaksanakan untuk semua jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. *E-auction* merupakan aplikasi berbasis internet yang dapat diakses melalui *browser* pada alamat www.lelang.go.id. Selain dengan komputer atau laptop, aplikasi juga dapat diakses melalui telepon pintar berbasis android. Dengan penggunaan media internet, peserta lelang dapat mengikuti lelang internet dari dan dimanapun berada serta tidak perlu hadir di tempat pelaksanaan lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meski semua sasaran strategis mencapai target, namun terdapat beberapa persoalan/permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah mengakibatkan kegiatan survey asset yang masuk target portofolio aset belum bisa dilaksanakan 100%;
2. Perlunya peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada satuan kerja terkait pengisian form pendataan portofolio aset untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengisian form pendataan;
3. Peningkatan pemahaman pada satuan kerja untuk melakukan penginputan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset;
4. Beberapa Debitur tidak ditemukan keberadaannya sehingga menjadi kendala dalam penerbitan surat keterangan tidak mampu;

5. Terdapat aset kredit yang diserahkan ke PUPN memiliki kualitas rendah dan nilai jaminan tidak mencukupi untuk menjamin hutang, aset kredit yang memiliki permasalahan hukum, dan aset yang dokumennya kurang lengkap, sehingga sulit untuk dicapai *recovery*-nya;
6. Daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena bencana *Covid-19*;
7. Persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang dapat menghasilkan harga yang optimal belum merata di seluruh lapisan masyarakat serta masih banyak gugatan/perlawanan/keberatan terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan, fidusia dan kepailitan sebagai penyelesaian dari kredit macet.

D. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV sebagaimana yang ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta IV selama tahun 2024 yang akan kami uraikan dalam Bab III Laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Jakarta IV di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Didalam renstra 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Untuk melaksanakan hal tersebut, ditetapkan juga Keputusan Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor KEP-263/WKN.07/KNL.04/2020 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun 2020-2024. Visi dan misi KPKNL Jakarta IV sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Visi DJKN adalah “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta IV sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta IV yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan tersebut, KPKNL Jakarta IV telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai KPKNL Jakarta IV, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberi manfaat ekonomi, sosial dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai Tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta IV melaksanakan program yaitu:

- Sosialisasi peraturan tentang pengelolaan BMN dan lelang kepada seluruh Satuan Kerja binaan KPKNL Jakarta IV;
- Melaksanakan e-rekon dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistem;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman/persepsi masyarakat terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
- Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada SOP (khususnya terhadap SOP Layanan Unggulan);
- Apel Pagi, yang dilaksanakan secara periodik untuk pegawai KPKNL Jakarta IV;
- Usulan Pegawai KPKNL Jakarta IV untuk mengikuti diklat teknis maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
- Membuat berbagai sistem aplikasi guna memudahkan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai di KPKNL Jakarta IV.

B. Penetapan Kinerja

Penerapan *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan KPKNL Jakarta IV dilengkapi dengan penetapan sasaran strategis utama *strategic outcome* pada tahun 2024 termasuk **19 IKU**. Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama, dan realisasi tahun sebelumnya, serta target 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG AKUNTABEL DALAM MENDUKUNG AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKEADILAN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	%	106,4%	100%
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	113,98%	100%
3. Indeks Integritas	Indeks	89,17	89,17
SASARAN STRATEGIS 2 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	%	N/A	71,5%

2. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	%	95,48%	86,5%
--	---	--------	-------

SASARAN STRATEGIS 3 PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Persentase realisasi pokok lelang	%	98,41%	100%
2. Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	%	124,26%	100%
SASARAN STRATEGIS 4 LAYANAN PENILAIAN YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	Indeks	96,04	75
SASARAN STRATEGIS 5 PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	120%	100%
2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	120,71%	100%
SASARAN STRATEGIS 6 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG PRODUKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	%	104%	74%
2. Persentase produktivitas lelang	%	105%	89%
SASARAN STRATEGIS 7 PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	0%	16%
SASARAN STRATEGIS 8 PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM YANG ADAPTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	120%	90%
2. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Indeks	99,13	85

SASARAN STRATEGIS 9 PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	99,79	100
2. Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	%	0%	10%
SASARAN STRATEGIS 10 KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Indeks	N/A	80
SASARAN STRATEGIS 11 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL YANG BERNILAI TAMBAH			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024
1. Indeks efektivitas UKI	Indeks	N/A	82

Ket:

* N/A = tidak tersedia, penjelasan akan disajikan dalam uraian sasaran strategis

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan dikelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Selanjutnya, pembahasan Akuntabilitas Kinerja dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, terhadap 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Tahun 2024 telah memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta IV sebesar 114,98%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Jakarta IV Tahun 2024 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

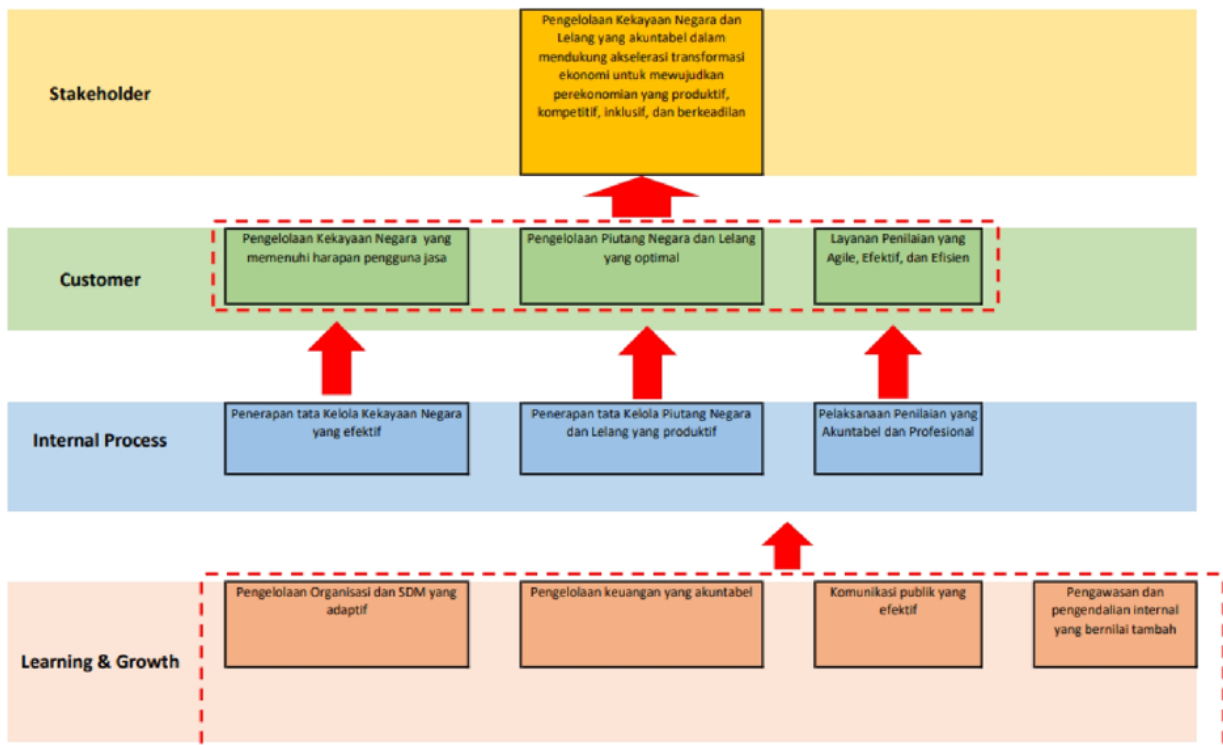
Sasaran Strategis		IKU	Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)	
SS 1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1.1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%
		1.2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	130,75%	120%
		1.3	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%
SS 2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50%	92,41%	120%
		2.2	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	99,07%	114,53%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3.1	Persentase realisasi pokok lelang	100%	72,16%	72,16%
		3.2	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	110,94%	110,94%
SS 4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4.1	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	94,09	120%
SS 5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5.1	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	122,58%	120%
		5.2	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	121,38%	120%
SS 6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6.1	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74%	62,30%	115,80%
		6.2	Persentase produktivitas lelang	89%	126,43%	120%
SS 7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7.1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0%	120%
SS 8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8.1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	113,00%	120%
		8.2	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	98,85	116,29%
SS 9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9.1	Indeksi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120%
		9.2	Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10%	0	120%

Sasaran Strategis		IKU		Target	Realisasi	% (Indeks batas Maks)
SS 10	Komunikasi publik yang efektif	10.1	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	112	120%
SS 11	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah	11.1	Indeks efektivitas UKI	82	98,79	120%

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu-three Tahun 2024 sebagai berikut:

Peta Strategi



Peta strategi Kemenkeu-three Tahun 2024 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth*

perspective. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 11 sasaran strategis (SS) dan 19 indikator kinerja utama (IKU) dengan peta strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan terdapat **3 (tiga) IKU** yaitu: (1) Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan; (2) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; dan (3) Indeks Integritas.

1. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Semakin baik pelayanan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Dengan target 100% dan realisasi sebesar 112,19 %. Adapun capaian IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112,19%	112,19%

2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara menurut definisi adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Jakarta IV berasal dari:

1) PNBPN Pengelolaan BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- i. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- ii. Pemanfaatan barang milik negara; dan
- iii. Pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (BIAD PN) yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- i. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- ii. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- iii. Biaya permohonan lelang;
- iv. Uang jaminan pembeli wanprestasi;
- v. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

**Tabel Realisasi Penerimaan Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024**

Uraian	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp47.350.000.000	Rp67.627.954.025	142,83%
b. PNBPN Piutang Negara	Rp5.245.700.000	Rp22.079.363.364	420,9%
c. PNBPN Lelang	Rp27.600.000.000	Rp15.147.721.839	54,88%
Realisasi IKU	Rp80.195.700.000	Rp104.855.039.228	130,75%

3. Indeks Integritas

Sebagai salah satu IKU di tahun 2024, Integritas dianggap sangat di perlukan sehingga diatur

kriteria pengukuran atas Integritas yang ada di KPKNL Jakarta IV. Dengan target 89,17% dan realisasi sebesar 92,44%. Adapun Capaian IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas	89,17%	92,44%	103,67%

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

Sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa terdapat **2 (dua) IKU** yaitu: (1) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan; dan (2) Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN.

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020.

Dengan target 71,5% dan realisasi sebesar 92,41%. Adapun Capaian IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	92,41%	129,24%

2. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan

pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	99,07%	114,53%

3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Sasaran strategis pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal terdapat **2 (dua)** IKU yaitu: (1) Persentase realisasi pokok lelang dan (2) Persentase penurunan outstanding Piutang Negara.

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp600.200.000.000	Rp433.091.700.165,00	72,16%

2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Dalam Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara yang menghasilkan angsuran piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp300.000.000.000	Rp332.821.963.399	110,94%

4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran strategis layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien terdapat **1 (satu) IKU** yaitu Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian.

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan kemampuan KPKNL dalam menyelesaikan layanan penilaian secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penilaian yang tepat waktu menjadi elemen penting dalam mendukung pengelolaan aset negara, baik untuk kepentingan penghapusan, pemanfaatan, pengadaan, maupun kebutuhan administrasi lainnya. Tingkat ketepatan waktu ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan efisiensi kerja, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan kepuasan pengguna layanan.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	94,09	125,45%

5. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif

Sasaran strategis penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif **terdapat 2 (dua) IKU** yaitu: (1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan; dan (2) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).

1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa tanah, dengan pembagian tugas/kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertipikat dan belum

bersertipikat, identifikasi dengan memetakan tanah belum bersertipikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik, penyusunan data BMN belum bersertipikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan, K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertipikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan, penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertipikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan, dan pelaksanaan sertipikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Pada tahun 2024, target bidang tanah yang disertipikatkan berjumlah 75.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	31	38	122,58%
X1		5	
X2		6	
X3		24	
X4		3	

2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Portofolio Aset adalah evaluasi kinerja BMN yang merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Capaian portofolio aset diperoleh dari Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya/jumlah target aset yang akan di evaluasi. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	121,38%	121,38%
A. Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	87	103	
% Aset yang Dievaluasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasi		118%	
B. Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker	6	8	
% Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Satker		133%	
TOTAL (80% komponen A + 20% komponen B)		121%	

6. Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

Sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif terdapat **2 (dua) IKU** yaitu: (1) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara, dengan target sebanyak 74% di tahun 2024, dan (2) Persentase produktivitas lelang dengan target sebanyak 89% di tahun 2024.

1. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dihitung dari jumlah BKPN yang lunas, ditarik, PSBDT, dikembalikan. Target BKPN Selesai pada tahun 2024 dengan persentase 100% dari target 2033 BKPN.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74%	62,30%	115,80%

2. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari intensitas frekuensi lelang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, lelang tersebut tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Produktivitas Lelang	89%	126,43%	142,06%

7. Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, dengan target tahun 2024 sebesar 16%.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian, nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dinilai oleh tim penilai. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0%	120%

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Sasaran strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdapat **2 (dua) IKU** yaitu: (1) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai; dengan target ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 90%, dan (2) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko dengan target ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 85.

1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar Jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 40 jam pelatihan (JP) dengan 1 jamlat adalah 45 menit. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	90%	113%	125,56%

2. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan reviu atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Reviu Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	98,85	116,29%

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sasaran strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel terdapat terdapat **2 (dua) IKU** yaitu: (1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dan (2) Deviasi data PNBP Fungsional DJKN.

1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Anggaran adalah salah satu sumber daya dalam organisasi.

Pengelolaan anggaran yang optimal adalah penggunaan anggaran untuk mendorong organisasi mencapai hasil kinerja yang maksimal. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran memiliki target tahun 2024 sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120%	120%

2. Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10%	0%	120%

10. Komunikasi Publik yang Efektif

Sasaran strategis Komunikasi Publik yang Efektif terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: (1) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID).

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu ketepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi Publik dihitung sejak permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat I.

Dalam hal permohonan ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan informasi yang diminta terkait PPID Tingkat I, maka PPID Kementerian Keuangan wajib

menyampaikan permohonan tersebut kepada PPID Tingkat I paling lambat 2 hari kerja setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap melalui nota dinas dan/atau e-mail, selanjutnya PPID Tingkat I wajib menyampaikan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan melalui nota dinas dan/atau e-mail paling lambat 13 hari kerja sejak diterimanya nota dinas dan/atau email permohonan dari PPID Kementerian Keuangan. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi melalui e-mail, surat, telepon, dan aplikasi E-PPID.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	112	140%

11. Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah

Sasaran strategis Komunikasi Publik yang Efektif terdapat **1 (satu) IKU** yaitu: (1) Indeks Efektivitas UKI.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Efektivitas UKI	82	98,79	120,48%

B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dalam Tahun 2024 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan jumlah sebesar Rp 2,777,510,000 tersebut pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 2,530,929,477 atau sebesar 91.12% dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel Laporan Pagu Dana Per Jenis Belanja
Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2024**

No	Program	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja pegawai	0	0	100
2.	Belanja Barang	2,421,001,000	2,203,526,411	91.02%
3.	Belanja Modal	356,509,000	327,403,066	91.84%
Jumlah		2,777,510,000	2,530,929,477	91.12%

Pada tahun 2024 ini, perhitungan persentase penyerapan anggaran sama dengan tahun 2024. Perhitungan realisasi IKU terdiri dari komponen persentase penyerapan anggaran, persentase keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi. Adapun perhitungannya adalah:

$$\text{Persentase IKU} = (\text{IKPA} \times 50\%) + (\text{SMART DJA} \times 50\%)$$

**Tabel IKPA Berdasarkan Online Monitoring SPAN
Per 31 Desember 2024**

No	Indikator IKPA	Bobot	Nilai	Capaian
A. Nilai IKPA				93,76%
1.	Revisi DIPA	10	10.00	
2.	Deviasi Hal III DIPA	15	15.00	
3.	Penyerapan Anggaran	20	19.22	
4.	Belanja Kontraktual	10	10.00	
5.	Penyelesaian Tagihan	10	10.00	
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10	9.93	
7.	Capaian Output	25	25.00	
Total		100	99.15	
B. Nilai SMART				100%
Capaian Tahun 2024				99.57 %

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta IV tahun 2024 yang telah disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Jakarta IV sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan kerja untuk mengetahui apakah kinerja yang telah dilaksanakan sudah mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan karena capaian yang hendak dicapai telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. KPKNL Jakarta IV telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang sangat fluktuatif, tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, KPKNL Jakarta IV senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan dengan optimal. **Hal ini tercermin dari pencapaian IKU pada tahun 2024 yang memuaskan dan secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jakarta IV mencapai 114,98%.**

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Jakarta IV mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat dan *stakeholder* lelang melalui sosialisasi untuk mendorong pemahaman terhadap lelang sebagai cara penjualan barang yang menghasilkan harga yang optimal;
2. Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi data hutang dengan penanggung hutang dalam rangka peningkatan kualitas data dalam upaya menunjang penyelesaian piutang negara serta percepatan pengurusan Piutang Negara;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas perencanaan pekerjaan, dan melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dijadwalkan dalam rangka mengatasi beban kerja yang ada dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

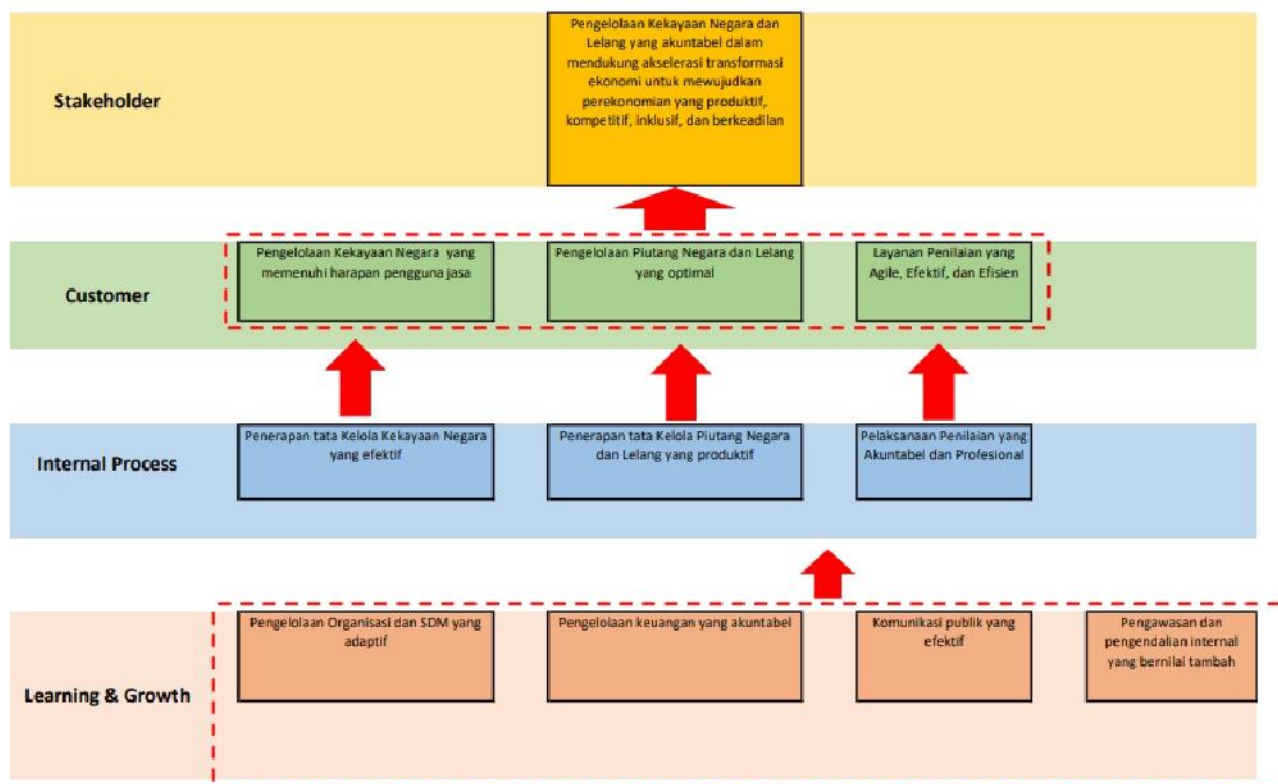
Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan rencana strategis maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta IV. Laporan Kinerja tahun 2024 kiranya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPKNL Jakarta IV pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.07/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp80,19 M)
		1c-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp600,2 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp300 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74 (2.413)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Deviasi data PNBFP Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82

Program:

Anggaran

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	710.376.000,00
Dukungan Manajemen	Rp	1.895.834.000,00

Kegiatan

Komunikaasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	30.780.000,00
Pengelolaan Asset	Rp	679.596.000,00
Legislasi dan Litigasi	Rp	61.978.000,00
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.799.408.000,00
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	17.134.000,00
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	17.314.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik
Mahmudsyah



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20	50	50	70	70	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	74	74
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Jakarta IV,



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Rofiq Manshur, S.E., M.M.	NAMA	Mahmudsyah	
NIP	197507251999031001	NIP	196407161991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100	Stakeholder
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Stakeholder

3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Indeks Integritas	89,17	Stakeholder
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Customer
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Customer
6.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase realisasi pokok lelang	100	Customer
7.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	Customer
8.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Customer
9.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Internal Process
10.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Internal Process
11.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	74	Internal Process

12.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	Persentase produktivitas lelang	89	Internal Process
13.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	Internal Process
14.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Learning & Growth
15.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Learning & Growth
16.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Learning & Growth
17.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	Learning & Growth
18.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Learning & Growth
19.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Learning & Growth

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>		

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Manshur

197507251999031001



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah

196407161991031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	41 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan (Unit Tertentu)	20	50	50	70	70	100	100
2	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
4	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
5	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5

6	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
11	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	81	81	74	74
12	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
13	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Manshur

197507251999031001



Ditandatangani secara elektronik

Mahmudsyah

196407161991031001





PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024

Nomor : PR-04/WKN. 07/2024

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit KPKNL Jakarta IV, saya menyatakan:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala KPKNL Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur



DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko		
			Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1.1	Pemberian layanan tidak tepat waktu sampai dengan potensi fraud/maladministrasi	8	8
		1.2	Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6	6
		1.3	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	12	10
		1.4	Loyalitas pegawai terhadap organisasi rendah	6	2
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2.1	Data capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tidak akurat	8	8
		2.2	Satuan kerja tidak memahami Peraturan terkait Pengelolaan BMN	8	6
		2.3	Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN	10	10
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3.1	Adanya pembatalan lelang	8	2
		3.2	Adanya pembeli lelang wanprestasi	11	6
		3.3	Piutang Negara yang disetor rendah	13	6
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4.1	Layanan Penilaian melewati norma waktu	13	6
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5.1	BMN berupa tanah tidak dilengkapi dokumen kepemilikan (Hak Pakai)	18	11
		5.2	Satker tidak menyampaikan <i>feedback/action plan</i> atas rekomendasi KPKNL	11	11
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6.1	Rendahnya pelunasan BKPN	11	11
		6.2	Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata	11	6
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7.1	Adanya perbedaan nilai antara permononan dengan nilai wajar BMN dalam rangka penilaian untuk tujuan pemindahtanganan/ pemanfaatan	6	6

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko		
			Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8.1	Pegawai tidak memenuhi jam latihan (jamlat) pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan	6	6
		8.2	Ketidaksesuaian antara <i>hard competency</i> pegawai dengan bidang tugas	9	6
		8.3	Tidak lengkapnya dokumen pengelolaan kinerja	2	1
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9.1	Ketidaksesuaian antara pengelolaan kinerja dengan RKA-K/L dan dokumen perencanaan lainnya	8	8
		9.2	Terjadinya efisiensi anggaran	1	2
10	Komunikasi publik yang efektif	10.1	Kurangnya SDM yang menangani PPID	13	6
		10.2	Frekuensi permintaan Informasi Publik (PPID) rendah	4	4
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11.1	Unit Kepatuhan Internal (UKI) melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan tidak sesuai dengan KMK 477 dan arahan lainnya yang telah ditetapkan	11	11

Jakarta , 30 Januari 2024
Kepala KPKNL Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur





-  [kpknj.jakarta4](https://www.instagram.com/kpknj.jakarta4)
-  [KPKNLJakartaIV](https://www.facebook.com/KPKNLJakartaIV)
-  [KPKNLJakarta4](https://twitter.com/KPKNLJakarta4)
-  [0815 8684 8888](https://wa.me/081586848888)
-  [kpknj.jakarta4](https://www.youtube.com/kpknj.jakarta4)
-  kpknj.jakarta4@kemenkeu.go.id
-  www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknj-jakarta4

Akses Cepat Layanan
KPKNL Jakarta IV

